



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN BUTA AKSARA DI DESA
PAUH ANGIT HULU KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Damra Abdul Hakim

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email:rsaputrayosi@gmail.com

ABSTRACT

This study uses a descriptive qualitative approach. The data collection technique used is a direct observation technique to Pauh Angit Hulu Village Based on the research that the author has conducted, it was temporarily found that there are several factors that affect illiteracy that occurs in Pauh Angit Hulu Village. Economic factors are the main factors that make people illiterate. Other factors are areas that are not accessible to literacy programs from the local government, social and cultural influences of the community, low motivation from the family environment, and lack of facilities and infrastructure to obtain reading resources, such as community reading gardens (TBM). Based on data from the Central Statistics Agency of Riau Province, there is still an increase in the number of illiteracy from year to year. One of them is Pauh Angit Hulu Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. According to reports from various communities and observations, there are still residents there who are classified as illiterate. The result of this study is that the illiteracy alleviation program is not implemented in Pauh Angit Hulu Village, Pangean District.

Keywords: Illiteracy, Implementation, Village Government

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi langsung ke Desa Pauh Angit Hulu Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, untuk sementara ditemukan ada beberapa faktor yang memengaruhi buta aksara yang terjadi di Desa Pauh Angit Hulu. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang membuat masyarakat buta aksara. Faktor lainnya adalah wilayah yang tidak terjangkau program keaksaraan dari pemerintah setempat, pengaruh sosial dan budaya masyarakat, rendahnya motivasi dari lingkungan keluarga, serta kurangnya sarana dan prasarana untuk memperoleh sumber bacaan, seperti taman bacaan masyarakat (TBM). Berdasarkan data Badan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Pusat Statistik Provinsi Riau, masih terjadinya peningkatan angka jumlah buta aksara dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut laporan dari berbagai masyarakat dan observasi, masih ada warga disana yang masuk dalam kategori buta aksara. Hasil dari penelitian ini adalah kurang terimplemantasi nya program pengentasan buta aksara di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean.

Kata Kunci: Buta Aksara, Implementasi, Pemerintah Desa

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah usaha untuk menjadikan orang atau masyarakat lebih mempunyai daya (*power*) dari pada sebelumnya. Pemberdayaan tidak hanya usaha peningkatan daya atau kemampuan semata akan tetapi juga pemberian peran, kewenangan bahkan tanggung jawab, sehingga diharapkan setelah adanya pemberdayaan dapat menumbuhkan sikap kemandirian.

Setelah tumbangnya masa pemerintahan orde baru tahun 1998 negara Indonesia mengalami reformasi yang menyebabkan perubahan sistem pemerintahan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Peraturan Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul skala desa, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Warga masyarakat yang buta aksara merupakan penghambat utama baginya untuk bisa mengakses informasi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap positifnya. Akibatnya, mereka tidak mampu beradaptasi dan berkompetisi untuk bisa bangkit dari himpitan kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan dalam kehidupannya. Setiap warga masyarakat perlu memiliki kemampuan keaksaraan fungsional, yang memungkinkan seseorang dapat beradaptasi dan bertahan dalam situasi yang selalu berubah dan kompetitif.

Tujuan berbangsa secara eksplisit tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam rangka itulah tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pandangan idealistik ini mendasari pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa.

Tidak terbantahkan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan arahan normatif bagi pembangunan pendidikan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka ditempuh tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat desa adalah masih adanya masyarakat desa yang dikategorikan buta aksara. Buta aksara terdiri dari dua kata yakni buta dan aksara. Buta diartikan sebagai tidak dapat melihat, mengenali sesuatu dalam bentuk dan warna dengan cara melihat. Sedangkan aksara adalah sistem tanda grafis atau sistem tulisan yang digunakan manusia untuk berkomunikasi.

Dengan sistem tulisan ini, manusia dapat menyimpan kekayaan akal budinya serta mengingat berbagai peristiwa. Karena daya ingat manusia terbatas, dapat dikatakan bahwa tulisan memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pencatatan sejarah dan berbagai macam peristiwa dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda grafis yang digunakan untuk pencatatan tersebut adalah huruf. Di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean masih di jumpai masyarakat yang masih dalam keadaan buta aksara yaitu dapat dilihat pada tabel berikut.

Menurut laporan dari berbagai masyarakat dan observasi, masih ada warga disana yang masuk dalam kategori buta aksara.

Tabel I.2: Data Buta Aksara Desa Pauh Angit Hulu Tahun 2022-2024

No.	Desa Pauh Angit Hulu	Angka Buta Aksara Menurut Kelompok Umur Wajib Belajar (Orang)		Keterangan
		12 -15	15-45+	
1.	Tahun 2022	9	5	14
2.	Tahun 2023	8	4	12
3.	Tahun 2024	3	2	5
Jumlah		20	11	31

Sumber : Desa Pauh Angit Hulu 2024

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Implementasi Program Pengentasan Buta Aksara Di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pemerintahan Desa Dalam Pengentasan Buta Aksara Di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi program pengentasan buta aksara Di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

- 2 Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program pengentasan buta aksara di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4.1 Aspek praktis

Mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait program pengentasan buta aksara di desa.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, dan memenuhi”. Di Indonesia disebut Administrasi dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Yaitu, yang pertama *administratie* dari bahasa Belanda, yang berarti tata usaha dalam arti sempit. Kemudian secara istilah, yaitu manajemen akan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua *administration* yang berasal dari bahasa inggris, yaitu proses kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian ada beberapa hal yang terdandung dari pengertian administrasi, yaitu, sekelompok orang, kegiatan, kerja sama, tujuan, dan efisien.

Menurut Hesti Umiyati (2016: 2) Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila secara formal dalam organisasi maka proses kerjasama tersebut adalah dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Organisasi merupakan manifestasi solidaritas mekanik, yaitu bahwa organisasi didasarkan atas persamaan, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memajukan institusi, kemampuan partisipasi aktif sehingga memungkinkan dan terbuka jalan kearah perluasan keahlian serta keterampilan. Setiap karyawan mampu menguasai bidang-bidang tugas atau pekerjaan lain yang bertujuan membantu karyawan bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau tiba masa pensiun atau pengurangan tenaga kerja atau dorongan untuk diversifikasi usaha-usaha lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Menurut Muhammad Sawir (2021: 64) Pengorganisasian berarti bahwa manajer atau pimpinan mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya mengarahkan sumber daya guna mencapai



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

tujuannya. Semakin terpadu dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi akan semakin efektif organisasi itu

2.1.3 Teori Kebijakan Publik

Menurut Muhammad Sawir (2021: 120) Kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika dikaitkan dengan istilah “privat”. Istilah publik dapat dirunut dari sejarah negara Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Yunani Kuno mengekspresikan kata publik sebagai *koinion* dan privat disamakan dengan *idion*. Bangsa Romawi Kuno menyebut publik dalam bahasa Romawi *res-publica* dan privat sebagai *res-privata*. Dengan menelusuri literatur sejarah Romawi, Gobetti (2007) memilah istilah privat dalam kaitannya dengan individu atau *person*; sedangkan publik merujuk pada komunitas atau negara. Dalam analisis Gobetti, John Locke termasuk pemikir politik yang lebih menekankan pada kepentingan privat atau individu, sedangkan Thomas Hobbes meyakini urusan publik atau negara lebih penting.

2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan Manusia

Menurut Ali Abdul Wakhid (2016: 41- 45) menyebutkan dalam konteksnya yang luas tersebut, Pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda pula. Dari beberapa pengertian pembangunan tersebut ialah:

1. Pembangunan adalah Perubahan.

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi kehidupan yang lainnya. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik.

2. Pembangunan adalah Pertumbuhan

Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapat penekanan dan sorotan dalam pembangunan, karena secara filsafat dapat dikatakan bahwa suatu organisme - suatu negara dapat dikatakan sebagai suatu organisme yang berhenti bertumbuh sesungguhnya sudah mulai dengan awal dari akhir kehidupannya. Karena suatu negara dipandang sebagai suatu organisme, maka logis pulalah apabila pertumbuhan itu diperlakukan sebagai bagian yang mutlak dari pengertian pembangunan.

3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional. Satu kondisi ideal - yang merupakan salah satu sasaran pembangunan - ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi. Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa pun tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan. Penelitian yang amat kausal menunjukkan bahwa dalam semua literatur tentang administrasi dan manajemen, pasti akan terlihat adanya kesepakatan para ahli untuk mengatakan bahwa perencanaan tidak bisa tidak harus dilakukan dalam rangka usaha pencapaian tujuan organisasi.

2.1.5 Teori/Konsep Implementasi

Menurut Lester dan Steward (dalam Mukhtar Mas'ud 2022: 14) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih.

2.1.6 Teori/Konsep Keaksaraan

Buta aksara terdiri dari dua kata yakni buta dan aksara. Buta diartikan sebagai tidak dapat melihat, mengenali sesuatu dalam bentuk dan warna dengan cara melihat. Sedangkan aksara adalah sistem tanda grafis atau sistem tulisan yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Dengan sistem tulisan ini, manusia dapat menyimpan kekayaan akal budinya serta mengingat berbagai peristiwa. Karena daya ingat manusia terbatas, dapat dikatakan bahwa tulisan memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pencatatan sejarah dan berbagai macam peristiwa dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda grafis yang digunakan untuk pencatatan tersebut adalah huruf.

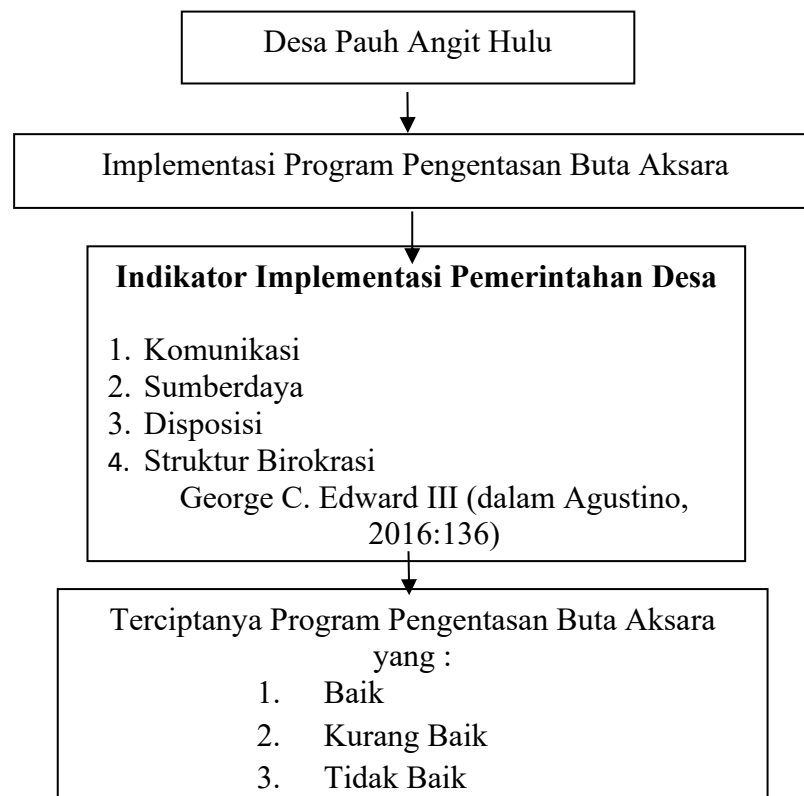
2.1.7 Teori/Konsep Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Achmad Mansur (2018: 1) Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.



2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Implementasi Program Pengentasan Buta Aksara Di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi peneliti 2024

2.3 Defenisi Operasional

Konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, sangat perlu rasanya penulis mengoperasionalkan konsep-konsep yang ada diatas. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan meminimalisir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

2.3.1 Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Penegtahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

2.3.2 Sumber Daya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

2.3.3 Disposisi

Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

2.3.4 Struktur Birokrasi

Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber – sumber daya menjadi tidak efektif dan termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

2.4 Operasional Variabel

2.5 Tabel 2.1 Operasioanl Variabel

Judul	Indikator	Sub Indikator	Penilaian
Implementasi Program pengentasan Buta Aksara Di desa Pauh Angir Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.	Komunikasi	Sosialisasi	Baik
		Kejelasan Program	Kurang baik Tidak baik
	Sumber Daya	Sember Daya Manusia	Baik
		Sumber Anggaran	Kurang baik Tidak baik
	Disposisi	Pelaksana	Baik
		Etika	Kurang baik Tidak baik
	Struktur Birokrasi	Kepemimpinan	Baik
		Standar Operasional Prosedur	Kurang baik Tidak baik

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2024

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, dimana hasil akhir dari penelitian ini dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Penelitian deskriptif



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

3.2 Informan

Menurut Sugiyono (2016: 54) informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Simple Random Sampling*.

Tabel III. 1 : Informan Penelitian Tentang Implementasi Program Pengentasan Buta Aksara Di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Unsur Informan	Jumlah Perangkat Desa		Persentase (%)
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Desa	1	1	10
2	Sekretaris Desa	1		10
3	Bendahara Desa	1		10
4	Masyarakat	2		20
5	Kasi Kesejahteraan	1		10
6	Kepala Dusun	3		30
7	Ketu BPD	1		10
Jumlah Keseluruhan		10	1	100

Sumber: Data Olahan Penulis 2024.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi secara mendalam dengan informan terhadap masalah yang diteliti.

3.3.2 Data Sekunder

Data skunder adalah data-data yang di peroleh dari buku-buku,dokumen dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kab. Kuantan Singingi yang mendukung danberhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.

3.4. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Implementasi program Pengentasan Buta Aksara di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5. Lokasi Penelitian



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Menurut Sugiono (2014: 157) Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

3.6.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.6.3 Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian.

3.7.3 Triangulasi

Menurut Moeleong (2007) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data Metode Analisis Data

Nasution (dalam Sugiono, 2017: 245) menyatakan bahwa teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis atau memeriksa data , mengorganisasikan data memilih dan memilahnya menjadi suatu yang diolah, dengan tiga komponen, yaitu :

3.7.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga sebagai pelengkap saja. Reduksi data bagian dari analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikianrupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Hal ini bertujuan agar analisis tidak terlalu keluar dari jalur rumusan masalah.

3.7.2. Sajian Data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019: 56), penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah kegiatan menyusun sekumpulan informasi untuk menarik kesimpulan dalam mengambil tindakan. Penarikan simpulan dan Verifikasi Dari sajian data yang telah disusun kemudian dapat dilakukan penarikan simpulan, yaitu kegiatan merumuskan kesimpulan yang dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga data dapat diuji validitasnya dan kesimpulan yang diambil lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.

3.7.3. Penarikan kesimpulan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Menurut Sari (2020: 25) penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola – pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Dari sajian data yang telah disusun kemudian dapat dilakukan penarikan simpulan, yaitu kegiatan merumuskan kesimpulan yang dapat diverivikasikan selama penelitian berlangsung sehingga data dapat diuji validitasnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Impelementasi Program Pengentasan Buta Aksara Di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk melihat hasil penelitian lebih sempurna dan maksimal terhadap Implementasi Program Pengentasan Buta Aksara Di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dengan sengaja turun ke lapangan untuk melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang telah ditentukan, serta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan membahas hasil penelitian ini dengan menggunakan indikator penelitian, yang mana hasil penelitian ini akan peneliti uraikan dengan indikator sebagai berikut:

Indikator Komunikasi Program Pengentasan Buta Aksara

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, dapat dilihat bahwa dalam Implementasi Program Desa terhadap pembangunan di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan usulan masyarakat atau sudah sesuai aspirasi, dan hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dilihat bahwa strategi atau langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam implementasi program buta aksara di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat dikatakan kurang baik.

Indikator Sumberdaya Program Buta Aksara

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, untuk indikator kedua Sumber Daya implementasi program desa dapat dilihat bahwa dalam sumber daya Program Pengentasan Buta Aksara Desa Di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dan hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan dana desa yang di laksanakan oleh pemerintah desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengorganisasian Kegiatan Implementasi program desa di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat dikatakan cukup baik. Dalam penelitian ini, selain mendapatkan hasil penelitian dengan wawancara terhadap beberapa orang informan, peneliti juga memberikan analisa dilapangan terhadap Implementasi Program Desa Di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi bila dilihat dari indikator Sumberdaya, yang mana hasil analisa peneliti dilapangan hampir sama dengan hasil wawancara peneliti, yang mana untuk Implementasi Program Buta Aksara Di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dengan cukup baik, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk Implementasi Program Buta Aksara Desa Di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi kurang berjalan dengan baik.

Indikator Disposisi Program Pengentasan Buta Aksara

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, untuk indikator ketiga yaitu disposisi dapat dilihat bahwa dalam Implementasi Program Buta Aksara Desa di Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan Kurang baik, dan hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan Implementasi program desa yang bersumber dari dana desa di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan baik. Untuk indikator Pelaksanaan dalam Implementasi Program Desa Di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti juga memberikan beberapa analisa terhadap penelitian tersebut, selain dari hasil wawancara peneliti dilapangan dengan beberapa informan, hasil analisa peneliti juga kami masukkan dalam peneltian untuk melihat kegiatan Pengentasan Buta Aksara Di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi bila dilihat dari indikator disposisi. Yang mana hasil Implementasi Program Desa Di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi kurang terimplementasi dengan baik .

Indikator Struktur Birokrasi

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, untuk indikator keempat yaitu Struktur Birokrasi dapat dilihat bahwa dalam hal Standar Operasional prosedur kegiatan yang ada terhadap Implementasi Program Desa Di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan standart yang berlaku, namun hasil observasi peneliti dilapangan dapat dilihat bahwa kegiatan Implementasi program desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan baik karena kegiatan tersebut tidak terimplemantasikan hanya berupa bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang peneliti dapat melalui hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa Implementasi Program Buta Aksara di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi kurang baik. Atau dapat dikatakan Implementasi Program Buta Aksara di Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi kurang terimplementasi.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Saran

- 6.2.1 Agar Pemerintah Desa mempertahankan kerja pemerintah Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean yang sudah lumayan cukup baik.
- 6.2.2 Agar Kepala Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean lebih sering mengadakan musyawarah desa terkait kegiatan Implementasi program desa agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Implementasi program desa .
- 6.2.3 Agar Pemerintah Desa membuat kotak saran di kantor Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean agar masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan untuk setiap kegiatan desa.
- 6.2.4 Agar masyarakat Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi selalu aktif dan bekerjasama dengan pemerintah desa dalam pembangunan desa, msuyawarah desa serta mengawasi jalannya pemerintan. Untuk mewujudkan *Good Governance* tentu diperlukan dukungan serta partisipasi dari masyarakat agar menjadi lebih optimal. Bukan hanya meningkatkan pembangunan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pauh Angit Hulu itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wakhid Ali, 2016, *Administrasi dan Pembangunan Nasional*, Bandar Lampung, Harakindo Publishing
- Andri Alsar, Himsar Siregar Mhd, 2021, *Keuangan Negara dan Daerah*, Depok, Rajawali Press
- Hildawati, Erlianti Dila, dkk, 2024, *Sistem Administrasi Negara*, Yogyakarta, PT.Green Pustaka Indonesia
- Kariyoto, 2018, *Manajemen Keuangan Konsep dan Implementasi*, Malang, UB Press
- Pasalong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rukayat Yayat, 2021, *Manajemen Pemerintahan Desa & Tata Kelolah Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta, Bee Media Pustaka
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif R& D*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatf dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti Tris Dina , 2024, *Administrasi Pembangunan*, Jawa barat, Rumah Cemerlang Indonesia
- Tjokroadmudjoyo, A. 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Artikel

- Ariyanti, 2022, *Pengaruh Efektivitas Implementasi Program Buta Aksara Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Astitah Basri, Sri Rahayu, 2019, *Efektivitas Implementasi Program Buta Aksara di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone*

Halimatus Sakdiyah, Ika Lis Mariatun, Zaiful Arief, 2021, *Efektivitas Implementasi Program Buta Aksara Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bilaporah Tahun 2021*

Hilmi, Ramlawati, 2020, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli*

Siregar, Kodir , 2018, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat*

Tumbel ,Satria Mentari, 2016, *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*

Peraturan Perundang-Undangan

Kemdagri. Kepmendagri No. 6090.900327

Tahun 1996 Kriteria Rasio Efektivitas.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Implementasi Program Buta Aksara Tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa